

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

PENGERTIAN (1)

- **Politik** (*politics*) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- **Policy** (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki.
- Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan → antara *politic* dan *policy* terdapat hubungan yang erat dan timbal balik.
- **strategi** adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

PENGERTIAN (2)

- **Politik** (*politics*) - kepentingan umum suatu bangsa, yang merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu.
- **Policy** (kebijaksanaan) - penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, tujuan yang dikehendaki.
- Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam usaha memilih cara-cara untuk mencapai tujuan → antara *politic* dan *policy* terdapat hubungan yang erat dan timbal balik.
- **strategi** adalah cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk politik.

DASAR PEMIKIRAN POLSTRANAS

- Poltranas yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
- Jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA.
- Badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (*interest group*), & kelompok penekan (*pressure group*).
- Suprastruktur politik dan infrastruktur politik harus dapat bekerjasama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

STRATIFIKASI POLSTRANAS (1)

➤ Stratifikasi Polstranas : stratifikasi kebijakan nasional dalam NKRI, meliputi : Tingkat Penentu Kebijakan Pusat, Tingkat Kebijakan Umum, Tingkat Penentu Kebijakan Khusus, dan Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.

➤ **Tingkat Penentu Kebijakan Puncak** meliputi kebijakan tertinggi yang lingkungannya nasional mencakup penentuan Undang-undang Dasar, dan yang berkaitan dengan masalah makro politik bangsa dan negara.

➤ Penentu kebijakan puncak adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Dekrit, Peraturan atau piagam Kepala Negara.

➤ **Tingkat Penentu Kebijakan Umum** merupakan tingkat kebijakan dibawah Tingkat Kebijakan Puncak yang lingkungannya juga nasional dan ditekankan pada masalah makro strategis guna mencapai situasi dan kondisi tertentu yang diharapkan.

➤ Bentuk hukum yang dihasilkan adalah UU, PP, Keputusan atau Instruksi Presiden, dalam keadaan tertentu dapat dikeluarkan Maklumat Presiden.

STRATIFIKASI POLSTRANAS (2)

- **Tingkat penentuan kebijakan khusus** merupakan kebijakan umum yang merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama pemerintahan.
 - * Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya.
 - * Bentuk hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri, Kepmen, Instruksi Menteri, Surat Edaran Menteri.
- **Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis** ditekankan pada suatu sektor bidang utama dalam bentuk prosedur dan teknik implementasi rencana, program dan kegiatan.
 - * Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak pada pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-lembaga Non-Departemen.
 - * Hasil penentuan kebijakan berupa Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non-Departemen atau Direktur Jenderal.

KEPENTINGAN NEGARA NEGARA MAJU TERHADAP INDONESIA

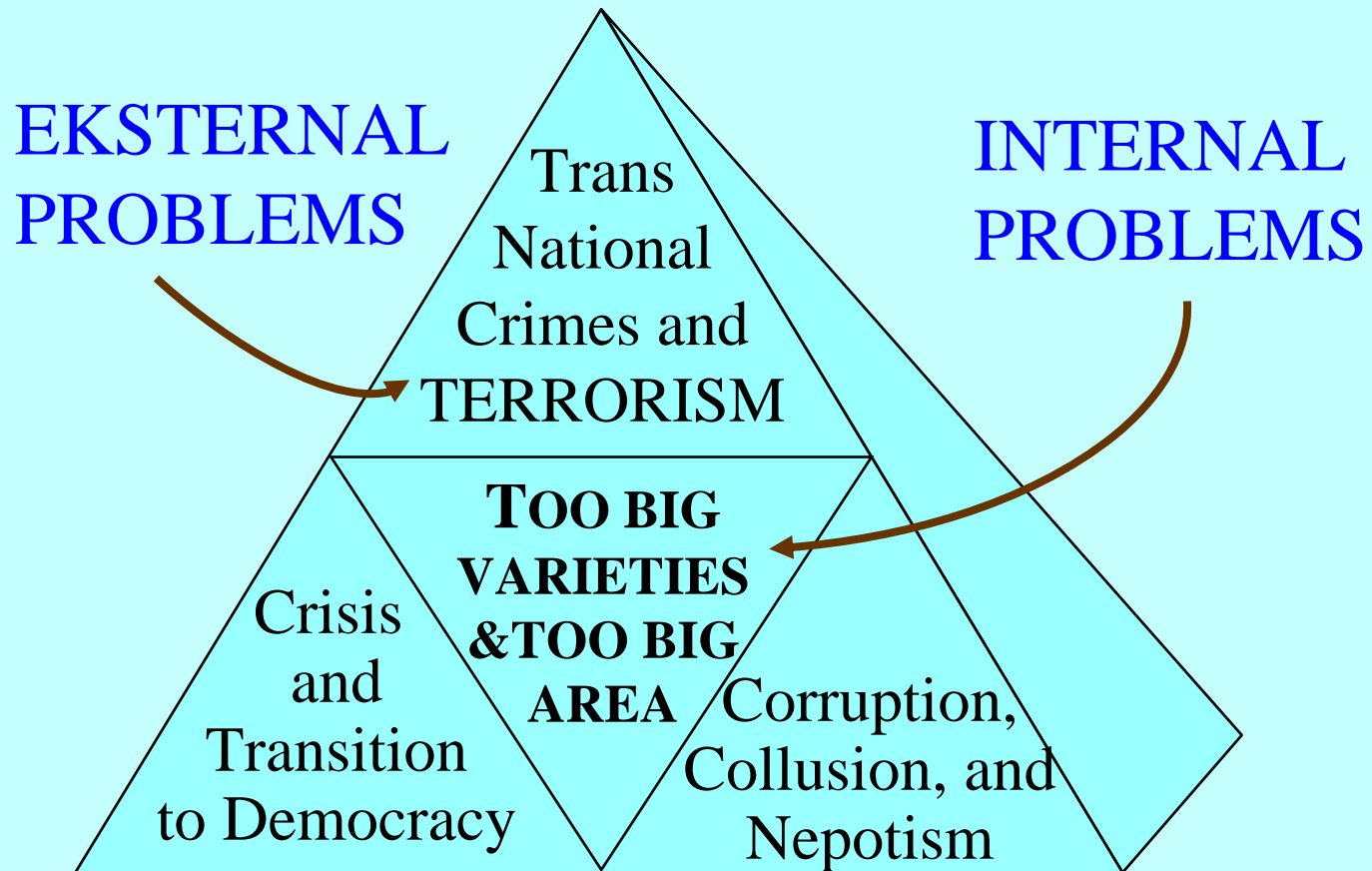
- ✉ Tidak menghendaki kehancuran Indonesia sebagai kekuatan yg dapat menopang politik dan ekonomi negara maju
- ✉ Tetapi negara maju juga khawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga sulit dikendalikan dan berpotensi merugikan kepentingannya
- ✉ Berusaha memasuki kawasan politik dan ekonomi Indonesia agar dapat ikut posisikan Indonesia pada kapasitas yg wajar untuk tetap mendukung politik&ekonomi, keamanannya

Kepentingan Negara Negara Regional Terhadap INDONESIA

- Tidak menghendaki kehancuran Indonesia karena [exodus] bisa menimbulkan kerepotan dan instabilitas regional
- Tetapi mereka juga khawatir Indonesia menjadi terlalu kuat sehingga mengancam eksistensi politik dan ekonominya
- Berusaha memasuki kawasan politik dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi dgn penguasaan saham dan kegiatan perdagangan

Perkembangan lingkungan nasional:

Constrains and Disadvantage



**Inadequate Politics and
*Management of Indonesia***

3T-1C Constrains Indonesia

Trans-national Crimes and **TERRORISME**

- ▶ Negative Respon to Global Politics
- ▶ Inconsistence, Weak Law Enforcement
- ▶ **Too Long Process of** Transition&Crisis

Transition Process **to DEMOCRACY**

- ▶ Incompatible Structure & Process
- ▶ Unbalance Power & Forces
- ▶ Inadequate Democracy Medium
- ▶ Inadequate Democracy Infrastructure

Too Big Area And **Too Big Varieties**

- ▶ Inadequate Capacity to National Mgmt
- ▶ **Incredible** National Government
- ▶ Ill Preparation to Decentralization

Corruption, Collusion and Nepotism

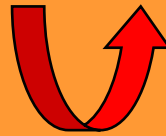
- ▶ No Constructive Incentive System
- ▶ **Inconsistence**, Weak Law Enforcement
- ▶ Inadequate Democracy Medium
- ▶ Inadequate Democracy Infrastructure

POLITICAL ACTION TO ENCOURAGE NATIONAL LEVERAGE

INTERNAL
PROBLEM

National
Disturbance

NATIONAL
ADVANTAGE



Rivalry Among
Existing State

Bargaining Power
in Regional

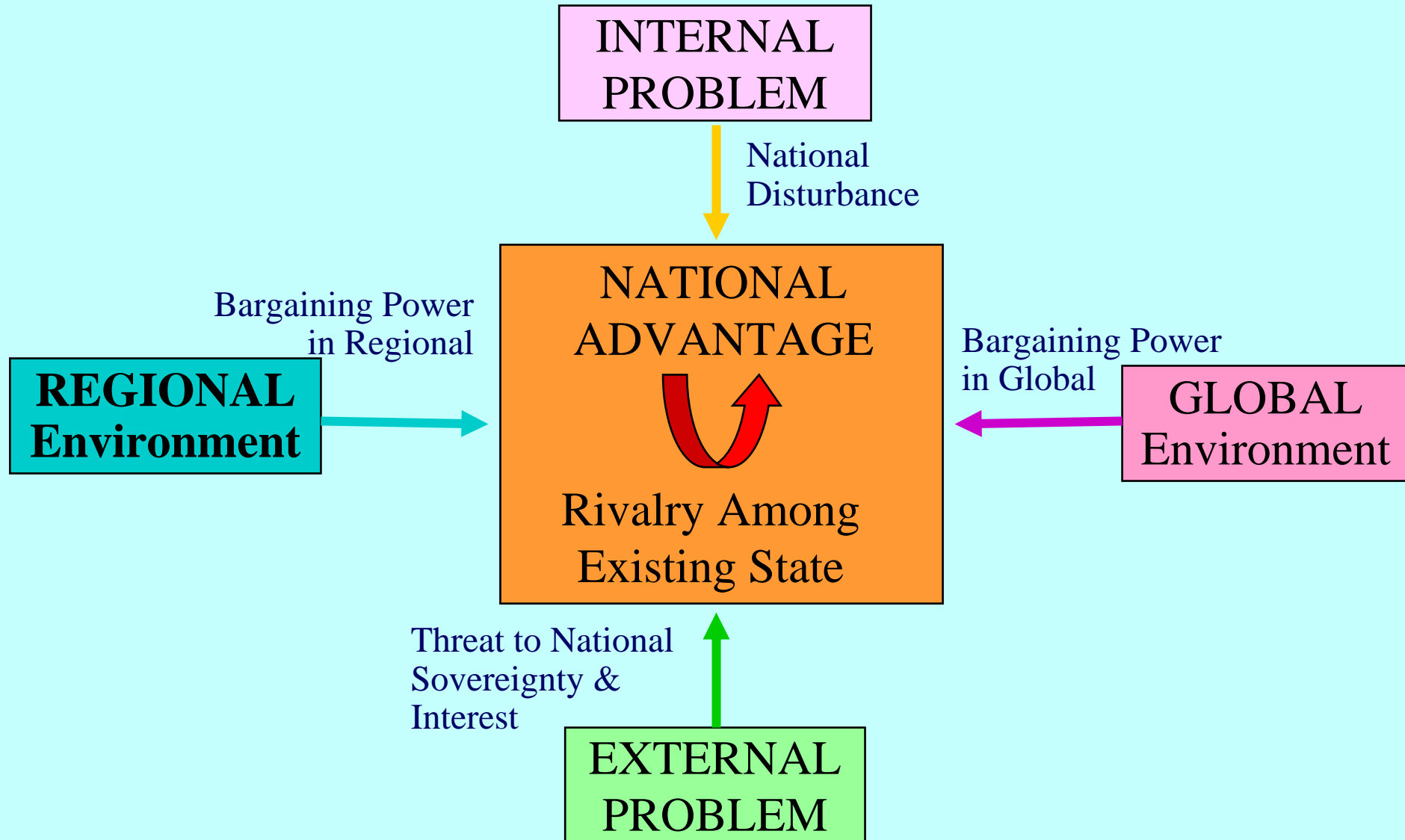
REGIONAL
Environment

Bargaining Power
in Global

GLOBAL
Environment

Threat to National
Sovereignty &
Interest

EXTERNAL
PROBLEM





• Politik Luar Negeri

- Tidak bertentangan secara frontal dengan negara negara besar
- Inovasi-inovasi baru untuk tingkatkan posisi tawar bagi kemenangan diplomasi
- Gunakan advantage untuk rengkuh peluang dan netralisir ancaman
- Teruskan Kerjasama cerdas dan proaktif baik Bilateral maupun multilateral

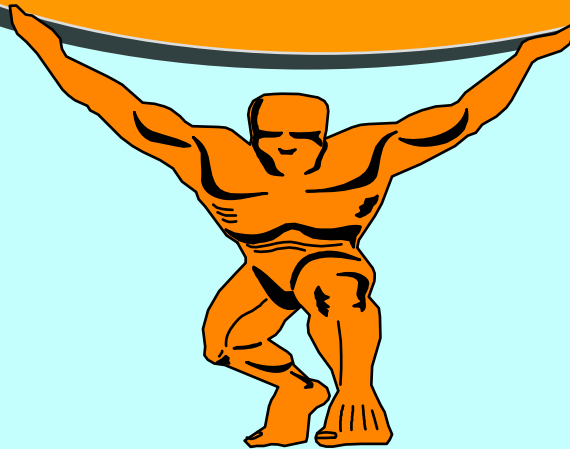
Politik Dalam Negeri

- Tanggulangi Ancaman Global
 - ✘ Trans National Crime, Terrorism
 - ✘ Radicalism, Separatism

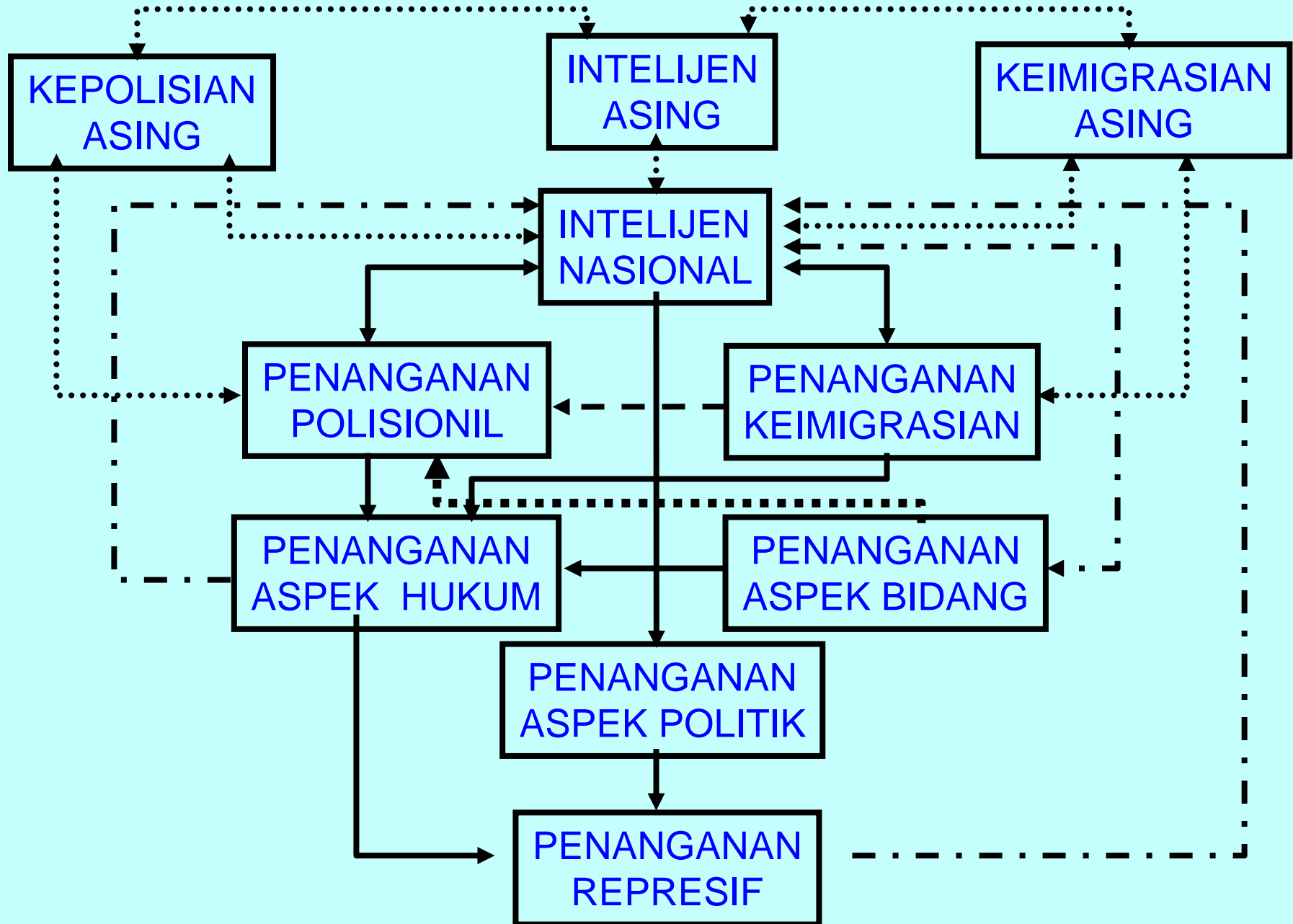
- Perkuat Sistem Demokrasi
 - ✘ Balance of Power, Transparansi
 - ✘ Perkuat yang lemah, kontrol yang kuat

- Otonomi Daerah Secara Konsisten
 - ✘ Langkah Sistematis & Berlanjut
 - ✘ Perkuat hubungan2 antar Daerah

STRATEGI NASIONAL



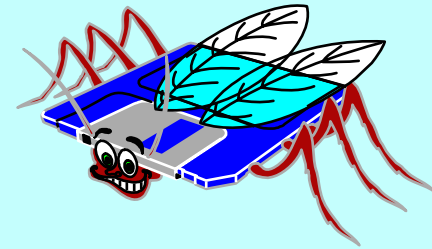
Strategi Penanganan Ancaman Global



PENGEMBANGAN SISTEM NEGARA DEMOKRATIS

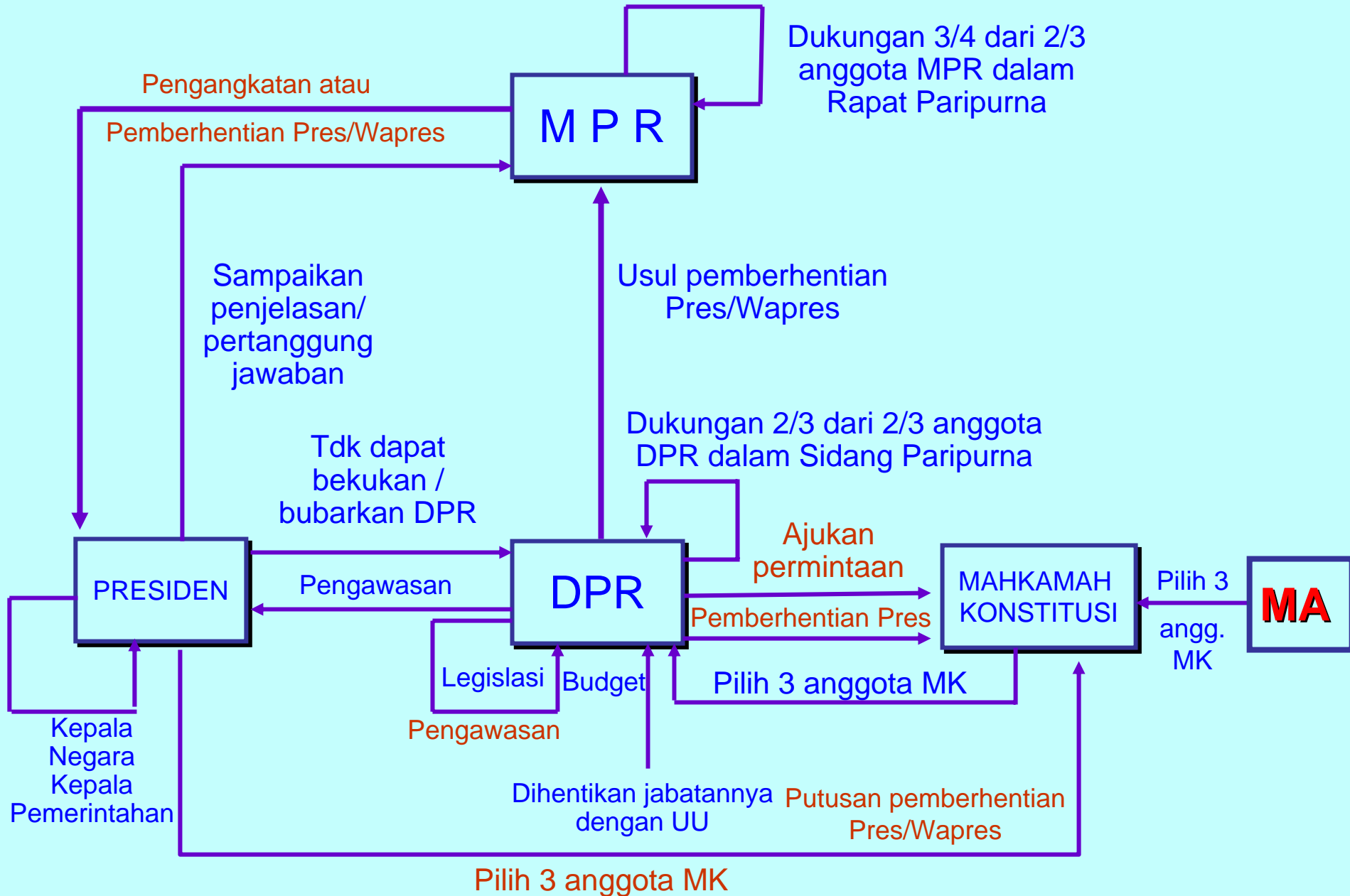
⇒ Penguatan Lembaga Negara dan
Rekrutmen Politik

⇒ Penyeimbangan Powership
antar Lembaga Negara



⇒ Penguatan Demokrasi dengan
Penyeimbangan Daya Dalam Sistem Usaha

PENYEIMBANGAN POWERSHIP ANTAR LEMBAGA



Penguatan Powership antar Sistem Usaha

✉ Kelompok Usaha Kuat

- Pengembangan Industri Strategis
- Perdagangan Internasional
- Win-win partnership dg usaha menengah-kecil

✉ Kelompok Usaha Kecil-Menengah

- Perdagangan dalam negeri
- Pengembangan Industri kecil & komponen
- Pasok kebutuhan industri dan perdagangan besar

Otonomi Daerah

Dekon
sentralisasi

Desentralisasi
Otoritas

Tugas Per
bantuan

Tg Jwb Substansi
& Teknikal

Control &
Feedback

Ideo, Pol, Ek, Agama
Kum, Sosbud, Kam

Negara Kesatuan
Berbentuk Republik

Yudikasi

Eksekusi

Legislasi

Ideo, Pol, Ek, Agama
Kum, Sosbud, Kam

Tg Jwb
Politik

Representasi dan Akomodasikan

Suku

Budaya

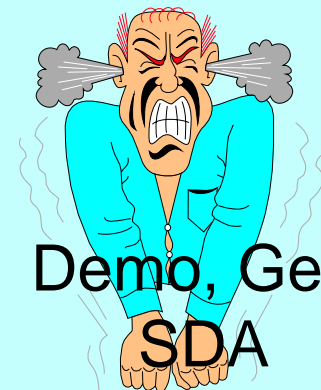
Agama

Bahasa

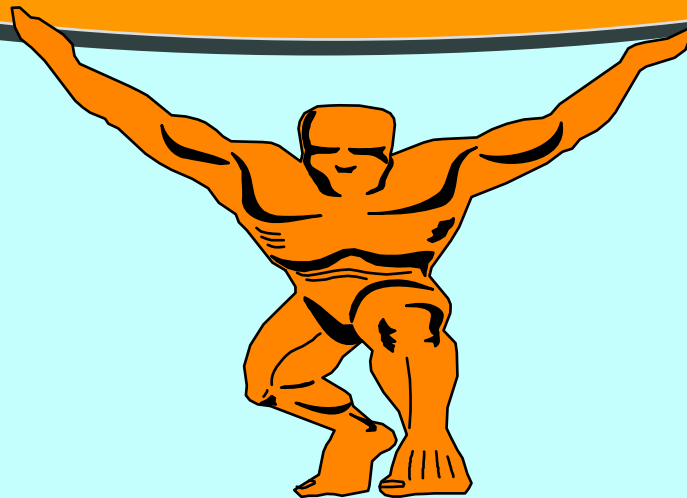
Adat

Keanekaragaman
Bentuk & Kondisi Geografis

Demo, Geo,
SDA



Strategi Bidang Pembangunan



Politik

- Penyempurnaan Struktur Politik
- Penataan Peran Negara dan Masyarakat
- Pengembangan budaya politik
- Peningkatan kapasitas & kinerja Polugri, Peningkatan kerma internas
- Komitmen perdamaian bdsk hukum, tolah unilateralisme dan agresi
- Peningkatan upaya komunikasi dan pembangunan & pendayagunaan informasi



Ekonomi

- ➔ Ciptakan kelembagaan & sistem usaha kondusif-kompetitif
- ➔ Memacu kebangkitan sektor riil sebagai prime mover perekonomian nasional
- ➔ Tingkatkan kinerja sektor keuangan dlm saluran dana & jaga kesehatan bank
- ➔ Tingkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi



Sosial Budaya

Pengembangan Nilai Sosbud

- Revitalisasi & reaktualisasi nilai tradisi
- Transformasi budaya utk pengkayaan
- Mainstreaming perikehidupan berwawasan nilai budaya
- Kedepankan modal sosial sebagai sumberdaya pembangunan

Pengelolaan keragaman budaya

Pengembangan seni & budaya Iptek

Pengelolaan aset budaya

Pertahanan dan Keamanan

Pengembangan kekuatan & profesionalisme aparat kepolisian & TNI

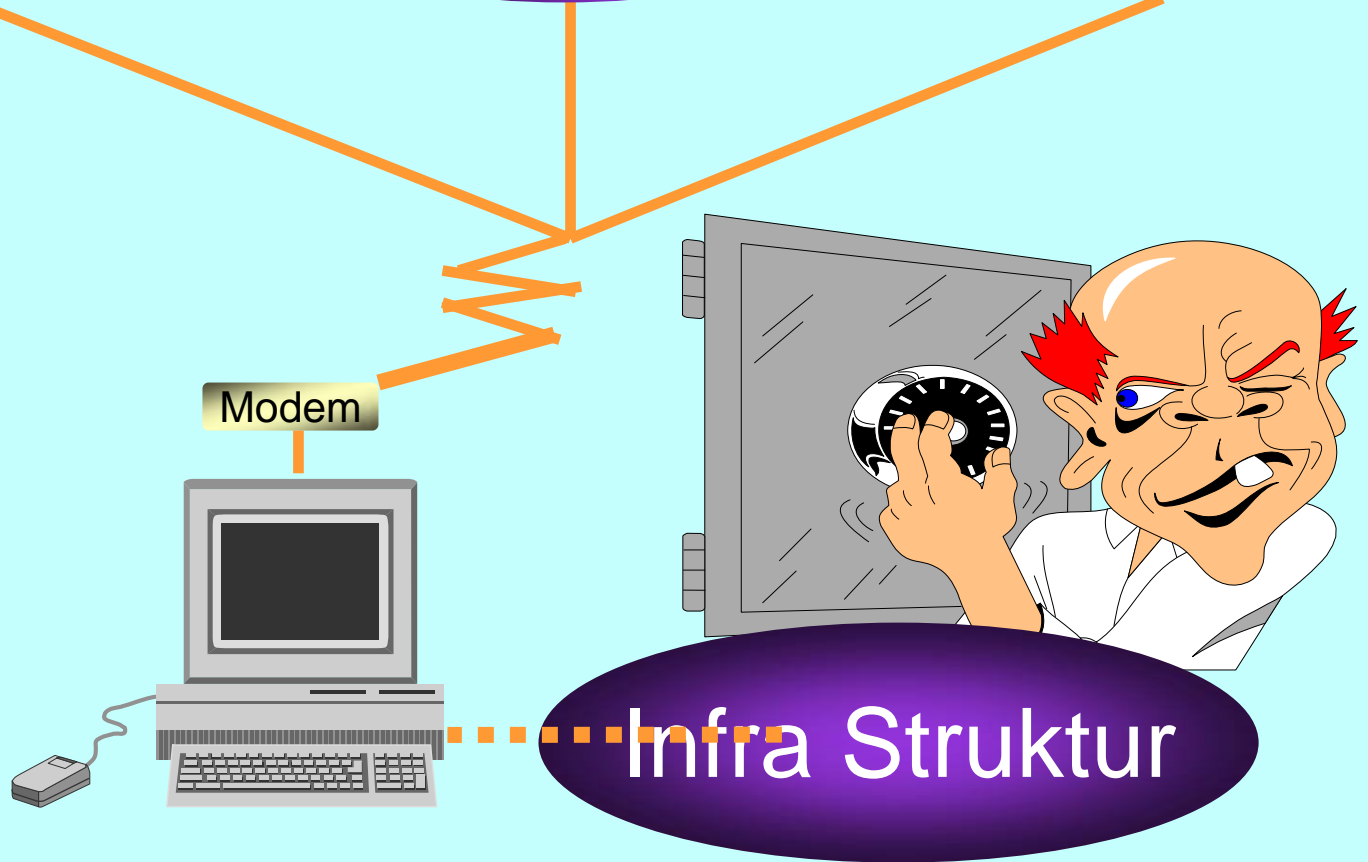
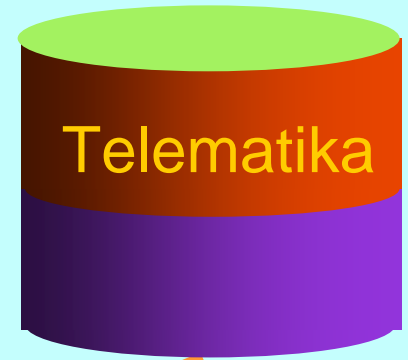
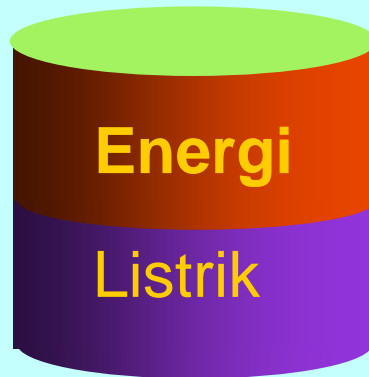
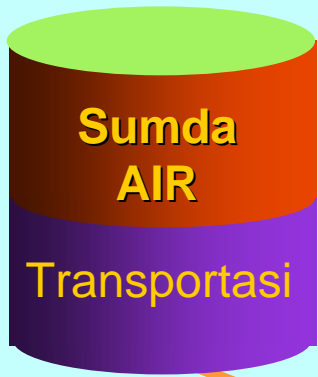
Pencegahan & penanggulangan kejahatan trans-nasional

Penegakan hukum dan keamanan di laut secara profesional dan proporsional

Penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif

Sumberdaya Manusia

- **Kesehatan** (sehat lingkungan, sumber daya kesehatan, obat-makanan-bahan berbahaya....)
- **Pendidikan** (wajib belajar 9 tahun, tenaga kependudukan, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, ...)
- **Kesejahteraan sosial** (rehabilitasi, perlindungan,)
- **Pemberdayaan perempuan**
- **Dan sebagainya**



APARATUR NEGARA DAN HUKUM

Pemberantasan
KKN & salah
gunakan
kewenangan

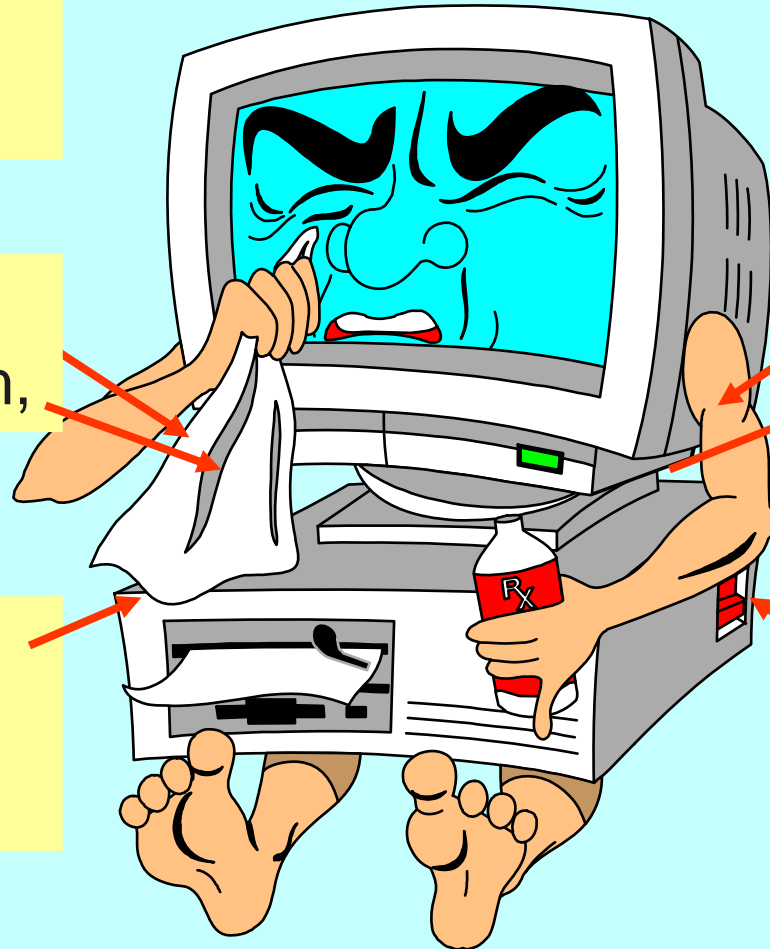
Tingkatkan
kualitas
penyelenggara
negara

Sadar hukum,
gakkum, yankum,

Kajian hukum,
sar-prasar hukum

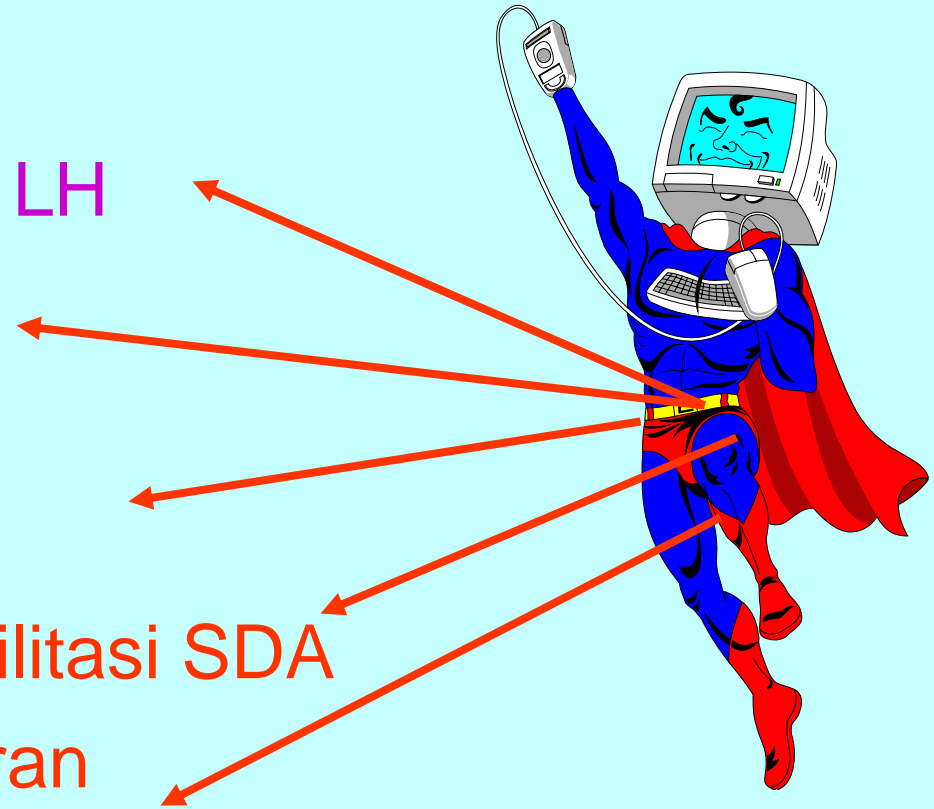
Rekrutmen dan
seleksi
kepemimpinan

Tingkatkan
kualitas
keberdayaan
masyarakat



Lingkungan Hidup

- Kualitas & akses SDA & LH
- Pdayagunaan SDA secara berkelanjutan
- Tata kelola SDA dan LH
- Perlindungan dan rehabilitasi SDA
- Pengendalian pencemaran lingkungan



THE END